

URGENSITAS AGAMA DALAM MASYARAKAT MADANI

Syaiful Hamali*

Abstrak

Dalam masyarakat yang sudah mapan, agama merupakan salah satu struktur institusional penting yang melengkapi dan mewarnai kehidupan masyarakat. Terutama dalam sistem sosial dan kepercayaan dalam berbagai bentuk kehidupan, agama benar-benar merupakan sebagai masalah sosial dan masalah bathiniyah yang sampai saat ini senantiasa ditemukan dalam berbagai masyarakat manusia. Agama benar-benar tertanam dalam jiwa manusia, sehingga nilai-nilai agama selalu memberikan energi pada manusia untuk bersikap dan bertingkah laku. Dalam masyarakat pluarlistik agama akan melahir sikap toleransi dalam kehidupan yang tumbuh dan berkembang dalam membentuk sistem komunitas umat manusia. Masyarakat madani dibentuk dengan landasan motivasi, dan etos kerja keagamaan pada akhirnya akan menumbuh kembangkan nilai-nilai jiwa keagamaan para anggota masyarakat.

Kata Kunci : Urgensitas agama, masyarakat madani

A. Pendahuluan

Agama dicirikan sebagai pemersatu aspirasi manusia yang paling sublim, sebagai sejumlah moralitas, sumber tatanan masyarakat dan perdamaian batin individu, sebagai sesuatu yang memuliakan dan membuat manusia beradab. Sebaliknya agama dituduh sebagai penghambat kemajuan manusia, dan mempertinggi fanatisme dan tidak toleran, pengacau, dan tahayul. Agama dalam kehidupan manusia pada hakikatnya tidak terdapat perbedaan, dalam memenuhi kehidupan bathinnya, yakni kebutuhan akan persepsi dan rasa kesucian manusia yang digerakkan oleh jiwa keagamaan, dikenal dengan istilah psikologi agama. Robert H. Thouless menulis tentang esensi psikologi agama bahwa, ... seandainya ia tidak memberikan sumbangan

langsung terhadap semangat keagamaan, sebenarnya ia memberikan sumbangan terhadap toleransi agama.¹

Sikap toleransi merupakan sikap yang harus dikembangkan dalam kehidupan masyarakat pluralistik, yaitu masyarakat yang terdiri dari berbagai macam ras, suku, agama dan daerah sebagai antisipasi terjadinya pergolakan dan perselisihan dalam masyarakat. Karena sikap toleransi menunjukkan sikap saling menghargai dan menghormati aktivitas yang dilakukan orang lain, walaupun aktivitas yang mereka itu berbeda dengan aktivitas-aktivitas yang dilakukannya

Masyarakat madani dibentuk dengan landasan motivasi, etos keagamaan, dan jiwa keagamaan anggota masyarakat. Maka kehidupan masyarakat madani menunjukkan lingkungan masyarakat yang beradab, berbudi luhur, berakhlak mulia, egalitarianisme dan menghargai seseorang berdasarkan prestasi kerjanya. Dan menegakkan hukum, toleransi, pluralistik, berkeadilan sosial dan menghidupkan demokrasi dalam wadah musyawarah. Kehidupan masyarakat madani kontemporer seiring dengan kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan Pancasila, dimana setiap masyarakat berusaha menanamkan nilai-nilai jiwa keagamaan dalam kehidupannya.

B. Agama Sebagai Dasar Kehidupan Masyarakat

Sikap toleransi dalam konteks psikologi agama memungkinkan lahirnya kesadaran dari masing-individu untuk menghargai dan menghormati pendapat serta aktivitas yang dilakukan oleh kelompok yang berberda. Dalam bingkai toleransi diletakan dasar-dasar pluralis, demokrasi, dan keadilan sosial bagi masyarakat. Selain dari itu, tertanamnya sikap toleransi pada diri individu akan memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk memperoleh hak-haknya, saling menghormati, dan mengakui keberadaan mereka, sehingga mereka diberikan kesempatan untuk hidup berdampingan.

Psikologi agama sebagai ilmu terapan (*applied science*) mempelajari pengaruh kepercayaan terhadap sikap dan tingkah laku atau mekanisme yang bekerja dalam diri individu, karena

¹Robert H.Tahouless, *Pengantar Psikologi Agama*, (Jakarta: Rajawali Press, Cet. I, 1992), h. 2.

cara berfikir, bersikap, dan bertingkah laku tidak bisa dipisahkan dari keyakinannya. Karena keyakinan itu termasuk kedalam konstruksi kepribadian. Psikologi agama mempelajari tentang kesadaran agama (*religious consciousness*), yaitu sesuatu yang hadir (terasa) dalam pikiran manusia dan dapat juga dikatakan bahwa ia adalah spek mental dan aktivitas agama. Sedangkan pengalaman agama (*religious experience*) adalah unsur perasaan dalam kesadaran agama, yaitu perasaan yang membawa seseorang kepada keyakinan yang dihasilkan oleh tindakan atau amaliah.

Dalam sejarah tercatat bahwa kerajaan Jepang menggunakan pendekatan psikologi agama dalam membangun kerajaannya, hal ini berawal dari mitos dalam agama Shinto yang mengajarkan bahwa Kaisar Jepang adalah titisan Dewa Matahari (*Amaterasu Omikami*), yang dapat menumbuhkan jiwa *Bushindo*, yaitu ketaatan terhadap pimpinan. Kepercayaan ini telah membangkitkan semangat para prajurit Jepang dalam peperangan dan melakukan *harakiri* (bunuh diri) sebagai mana yang dilakukan pasukan *Kamikaze* (berani mati). Setelah merdeka, jiwa *bushindo* dan *harakiri* bergeser menjadi etos kerja, disiplin dan tanggung jawab pada pekerjaannya. Konsekwensi dari pekerjaannya itu, para pemimpin Jepang bila tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, maka lebih baik mundur dari jabatannya atau melakukan *harakiri* (bunuh diri). Berbeda dengan pengembangan masyarakat Islam di *Madinah al-Munawarah*, nabi Muhammad Saw memulainya dengan menanamkan nilai-nilai Tauhid kepada masyarakat yaitu dengan mendirikan masjid Quba, masjid pertama didirikan Nabi Muhammad Saw dan kaum *Muhajirin*, sebagai tempat beribadah/kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, kemudian nabi membentuk hubungan *siratullah* antara kaum *Anshor* dengan kaum *Muhajirin* dan mengadakan perjanjian Madinah.

Masyarakat madani merupakan sebuah wacana yang telah mengalami proses yang panjang. Munculnya konsep ini disebabkan adanya kekuatan civil sebagai bagian dari komunitas bangsa yang menghantarkan masyarakat pada sebuah wacana yang saat ini sedang berkembang di berbagai belahan dunia dengan label yang berbeda-beda, misalnya masyarakat madani, masyarakat sipil (*civil society*), dan masyarakat kewargaan. Masyarakat madani berbeda dengan masyarakat sipil (*civil*

society) yang tumbuh dari konteks sosial masyarakat kontemporer Barat yang lahir dari gerakan perlawanan rakyat, guna melepaskan diri dari *rezim-rezim* penindas, dan otoriter, perjuangan mereka tidak ada hubungannya dengan agama. Disamping itu, wawasan *civil society* muncul bersamaan dengan proses modernisasi di Eropa, terutama saat terjadinya transformasi sosial dari masyarakat feodal menuju masyarakat modern.

Intelektual muslim kontemporer berusaha memformulasikan nilai-nilai agama dalam mengembangkan masyarakat madani sebagai landasan operasional dalam bersikap, dan bertindak bagi setiap individu. Masyarakat madani hidup dan berkembang dalam lingkungan masyarakat yang beradab, berbudi luhur, berakhlak mulia, *egalitarianisme* dan menghargai seseorang berdasarkan prestasi kerja.

Tim ICCE UIN Jakarta mengutip pendapat AS Hikam bahwa dalam tradisi Eropa (sekitar pertengahan abad XVIII), pengertian *civil society* dianggap sama dengan pengertian negara (*state*), yakni suatu kelompok/ kekuatan yang mendominasi kelompok masyarakat lainnya. Akan tetapi pada paruh abad XVIII terminologi ini mengalami pergeseran makna. *State* dan *civil society* dipahami sebagai dua buah *ententitas* yang berbeda, sejalan dengan proses pembentukan sosial (*social formation*) dan perubahan struktur politik di Eropa sebagai pencerahan (*enlightenment*) dan modernisasi dalam menghadapi persoalan dunia.²

Sedangkan istilah masyarakat madani sering juga dipakaikan untuk masyarakat sipil (*civil society*). Namun dikalangan cendekiawan Muslim berusaha membedakan antara masyarakat madani dengan *civil society* Sebagaimana dijelaskan Nurcholis Madjid bahwa masyarakat madani merupakan masyarakat yang dibentuk dengan landasan motivasi dan etos keagamaan, dan menjadikan agama sebagai kriteria masyarakat yang berperadab (masyarakat madani). *Civil society* dalam konteks masyarakat Barat, lebih kepada aspek politik

² Tim ICCE UIN Jakarta, *Pendidikan Kewargaan (civic Education) Demokrasi, Hak Asasi manusia & Masyarakat Madani*, (Jakarta: Perdana Media, Edisi Revisi, 2003), h. 238.

dan perlindungan hukum dari hubungan yang berbenturan antara negara disatu pihak dengan warga Negara di lain pihak.³

Ahmad Baso dalam Nurcholis Madjid menulis bahwa: cendekiawan muslim Indonesia menarik wacana *civil society* ke dalam konteks sejarah Islam, karena keyakinan mereka bahwa tradisi Islam juga memiliki perjalanan historis mengenai hal tersebut. Dasar-dasar masyarakat beradab yang telah dimiliki Bani Abbasiyah, kemudian dikembangkan oleh para khalifah yang bijaksana (*al-Khalifah Ar-Rasyidin*).⁴

M. Dawam Raharjo mendefinisikan masyarakat madani adalah masyarakat yang mengacu kepada nilai-nilai kebijakan umum yang disebut *al-Khair*. Masyarakat seperti itu harus dipertahankan dengan bentuk persekutuan, perkumpulan, perhimpunan atau assosiasi yang memiliki misi dan praktek.⁵ Pada kesempatan lain, Dawam mengutip pendapat Anwar Ibrahim bahwa dalam masyarakat madani mengandung tiga hal, yaitu; agama sebagai sumber peradaban, sebagai posisinya, dan masyarakat kota adalah hasilnya seperti yang pernah dicontohkan nabi Muhammad Saw dalam membangun masyarakat Madinah melalui sebuah perjanjian yang dikenal dengan perjanjian Madinah.⁶

Dalam pandangan psikologis masyarakat madani yang dibangun Nabi Muhammad Saw selalu mendasarkan aktiivitasnya kepada nilai-nilai agama sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

C. Tipologi Masyarakat dan Agama

Dalam masyarakat agama, bentuk kepercayaan merupakan sesuatu yang bersifat sentral dalam kehidupan mereka, oleh sebab mereka menghubungkannya dengan sesuatu yang bersifat dalam hidup ini. Agama menawarkan hubungan melalui pemujaan dan upacara ibadah, karena itu memberikan rasa emosional bagi rasa

³ Nurcholis Madjid, *Kehampaan Spiritual Masyarakat Modern*, (Jakarta : Penerbit Media cita, 2000), Cet. I, h. 3.

⁴ Nurcholis Madji, *Civil Society Versi Masyarakat Madani*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1990), h. 21.

⁵ M.Dawam Raharjo, *Masyarakat Madani: Agama Kelas Menengah dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: LP3ES), h. 52.

⁶ *Ibid*, h. 145

aman baru dan identitas yang lebih kuat ditengah-tengah ketidakpastian dan ketidakmungkinan bagi kehidupan manusia.

Keberagamaan seseorang memiliki pengaruh yang kuat terhadap perilaku masyarakat yang bersumber pada emosi keagamaan. Maka ditemuilah berbagai bentuk persepsi masyarakat terhadap agama. Setiap masyarakat mempunyai pola dan tingkah laku keagamaan yang berbeda. Dengan demikian ditemuilah berbagai tipe masyarakat dan agama, sebagai berikut:

1. Tipologi Masyarakat yang Terbelakang dan nilai Sakral

Masyarakat-masyarakat yang mewakili tipe ini dijelaskan Elizabeth, bahwa tingkat perkembangan teknik mereka masih rendah dan pembagian kerja atau pembidangan kelas-kelas sosial relatif masih kecil. Keluarga adalah lembaga mereka yang paling penting dan spesialisasi pengorganisasian kehidupan pemerintahan dan ekonomi masih amat sederhana. Laju pertumbuhan sosial masih lambat.⁷

Pada tipe ini pembagian tugas belum ada, dimana seorang kepala desa merangkap sebagai tokoh agama, pemuka masyarakat, tokoh adat, penentu dalam pertanian dan juga seorang dukun, dan tambah jumlah mereka masih sedikit. Tetapi rasa kekeluargaan mereka sangat kental, mereka sering bertemu dan berbicara-bicara apabila mereka mendapat kesulitan masyarakat. Selanjutnya, pengembangan tradisi-tradisi hanya melalui berita dari mulut ke mulut anggota masyarakat, ini disebabkan rendahnya tingkat tulis baca mereka. Bagi individu agama menjadi landasan dalam proses sosialisasi. Hal ini ditandai dengan dilaksanakannya upacara-upacara keagamaan. Misalnya pada peristiwa kehamilan, kelahiran, pada waktu seseorang memasuki usia remaja, peristiwa kematian. Pada tipe ini agama dan nilai-nilai yang sakral memiliki peranan yang dominan dan menentukan dalam kehidupan masyarakat.

Elizabeth berkesimpulan bahwa ada dua masalah pokok dalam masyarakat tipe ini, yaitu; *Pertama*, agama memasukkan pengaruhnya yang sakral ke dalam sistem nilai-nilai masyarakat secara mutlak. *Kedua*, dalam keadaan lembaga lain selain

⁷ Elizabeth K, Nottingam, *Religion And Society*, ter, Abdul Muis Naharong, (Jakarta : CV. Rajawali, Cet. I, 1985), h. 51.

keluarga, relatif belum berkembang, agama jelas menjadi fokus utama bagi pengintegrasian dan persatuan dari masyarakat secara keseluruhan.⁸ Nilai-nilai agama seringkali menimbulkan dan meningkatkan sikap konservatisme dalam menghalangi perubahan-perubahan kehidupan sosial masyarakat, seolah-olah agama turut menghambat kemajuan.

2. Tipe Masyarakat Pra Industri /Sedang Berkembang.

Masyarakat tipe ini lebih dikenal dengan istilah masyarakat dunia ketiga, yaitu suatu masa yang berada di antara tipe masyarakat terkebelakang dan nilai-nilai sakral dengan tipe masyarakat industri yang sekuler. Adapun ciri-ciri masyarakat ini: jumlah anggota masyarakatnya tidak begitu besar, dan terisolir, perubahan lebih cepat, daerahnya lebih luas serta tingkat perkembangan teknologi dan pengetahuan lebih tinggi bila dibandingkan dengan tipe pertama. Selanjutnya pembagian kerja telah mulai kelihatan, timbulnya stratifikasi sosial dalam masyarakat, adanya kemampuan tulis baca dikalangan masyarakat sampai tingkat tertentu. Masalah pertanian dan industri tangan adalah sarana utama untuk menopang ekonomi pedesaan dengan beberapa kota sebagai pusat perdagangan di kota. Kemudian lembaga-lembaga pemerintahan dan kehidupan ekonomi berkembang pesat yang mengarah kepada spesialisasi dalam keahliannya masing-masing

Dadang Kahmat menjelaskan bahwa; organisasi keagamaan yang biasanya menghimpun semua anggota, memberikan ciri-ciri khas kepada tipe ini, meskipun ia merupakan organisasi formal yang terpisah dan berbeda serta memiliki tenaga yang proposional sendiri. Agama memberikan arti dan ikatan pada sistem nilai dalam tipe masyarakat ini. Akan tetapi masih pada saat yang sama, lingkungan yang sakral dan sekuler sedikit banyak masih dapat dibedakan.⁹

Dalam masyarakat ini agama mempunyai fungsi ganda, disatu sisi berfungsi sebagai pemersatu dan di sisi lain, agama itu sebagai pemecah belah, hal ini disebabkan: *Pertama*, dalam

⁸ *Ibd*, h. 52.

⁹ Dadang Kahmat, *Sosiologi Agama, Potret Agama dalam Dinamika Konflik, Pluralisme, dan Modern*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, Cet. I, 2010), h. 126.

masyarakat pra industri dan masyarakat yang sedang berkembang, dimana perangkat organisasi keagamaan dan struktur kekuatan politik bias menimbulkan bentrok politik keagamaan dalam masyarakat. Benturan-benturan itu bisa dianggap sebagai usaha mempersatukan, karena benturan itu telah berfungsi menyatukan bersama masing-masing masyarakat. *Kedua*, timbulnya benturan-benturan yang meruncing antara kepentingan organisasi keagamaan dan organisasi politik, hal ini disebabkan masing-masing organisasi mempunyai cakupan wilayah masing-masing, struktur dan sikap dasar sendiri. Sedangkan setiap organisasi menuntut kesetiaan anggotanya. *Kedua*, bentuk organisasi memiliki bentuk operasinya yang sama, sehingga menimbulkan benturan antara kedua organisasi tersebut. Seperti yang terjadi pada waktu pemilihan Presidien dan wakil Presiden, pemilihan Gubernur/Wakilnya dan Pemilihan Bupati/wakilnya serta Pemilihan Wali Kota/Wakilnya. *Ketiga*, masyarakat tipe ini semakin majemuk, perlawanan antara kelompok pertama dan kelompok yang datang belakangan mulai menurun. Kelompok terakhir datang dengan tatanan politik dan ekonomi baru, maka agama bisa tampil dengan pembaharuan yang bersifat kreatif.¹⁰ Dalam pengamatan penulis, konteks masyarakat tipe ini menegggambarkan kondisi Indonesia di akhir abad ke 20 yang dikenal dengan era reformasi yang tampil dengan konsep-konsep baru dalam bidang pemerintahan, politik, ekonomi, masyarakat dan tatanan kehidupan baru.

3. Tipe Masyarakat Industri dan Sekuler

Kehidupan masyarakat tipe ini sangat dinamik, kemajuan teknologi semakin berpengaruh dalam segala aspek kehidupan. Mereka semakin terbiasa menggunakan metode empiris berdasar penalaran, dan efisiensi dalam menanggapi berbagai masalah, akibatnya kehidupan keagamaan mendapat tantangan, karena lingkungan yang sekuler semakin melemahkan hal-hal yang berbentuk sakral, sehingga mempersempit ruang lingkup kepercayaan dan pengalaman agama, hilangnya nilai-nilai humanistik dalam masyarakat.

Didalam masyarakat modern yang semakin kompleks, organisasi keagamaan terpecah-pecah dan bersifat majemuk.

¹⁰ Elizabeth K. Nottigham, *Op.Cit*, h. 56-57.

Keanggotaannya didasarkan pada prinsip organisasi-organisasi keagamaan tertentu, semakin melebarnya jurang pemilisah antara nilai sekuler dan nilai sakral, selain itu tidak ada ikatan resmi antara organisasi keagamaan dengan organisasi pemertintah duniawi. Tetapi dalam pelaksanaannya mereka saling bekerjasama untuk mencapai tujuannya masing-masing. Organisasi-organisasi sekuler masih meminta bantuan pemuka agama pada acara-acara resmi kenegaraan. Begitu pula organisasi politik masih memakai simbol-simbol keagamaan tertentu dalam mencapai tujuannya.

Namun, ciri-ciri ini mempunyai implikasi-implikasi khusus bagi agama yang berfungsi ganda, yaitu sebagai pemersatu atau sebagai pemecah belah. Sehingga kekuatan sekulerisme sangat melemahkan nilai-nilai agama. Mereka mengambil sikap toleransi terhadap perbedaan agama sebagai ciri khas dari masyarakat ini. Akibat ketidak acuhan mereka dalam menghadapi pengaruh sistem nilai sekuler yang semakin berkembang; organisasi-organisasi keagamaan pun tidak lupa dari pengaruh sekulerisasi.

Berbagai penganut organisasi keagamaan melaksanakan fungsi pemersatu bagi kelompoknya yang sebagian besar anggotanya berasal dari kelas atau suku minoritas dalam masyarakat, pada kelompok ini agama memegang tugas rangkap, yaitu: *Pertama*, agama menyatukan anggotanya akibat tersingkirkan atau terlantarkan dalam tatanan kehidupan sosial. *Kedua*, Agama sebagai pembatas timbulnya memecah-belah kelompok dan mengilangkan identitas.

Dalam mensosialisasikan nilai-nilai agama, orang tua masih menyerahkah anaknya pada kegiatan keagamaan sekolah Sabtu dan Minggu yang diadakan gereja. Elizabeth menjelaskan bahwa dalam mendidik anak-anak, kebanyakan orang tua di Amerika masih beranggapan bahwa nilai-nilai keagamaan tradisional atau nilai-nilai serupa yang telah diperbaharui dengan versi baru merupakan landasan pembentuk karakter yang dapat dibenar.¹¹

Selanjutnya Elizabeth menjelaskan bahwa dalam masyarakat tipe ini terdapat berbagai tipe penyesuaian yang lazim

¹¹*Ibid*, h. 52.

terhadap masalah keutuhan kepribadian dalam masyarakat industri modern. *Pertama*, kepribadian seseorang secara inklusif terintegrasi atas dasar nilai-nilai organisasi keagamaan tertentu, dimana dia menjadi anggotanya. *Kedua*, pengintegrasian kepribadian yang baik melalui proses penggolongan (*compartmentalization*). Dia mampu menggabungkan yang bersifat konvensional dari apa yang disebut sekolah agama Sabtu dan Minggu dengan orientasi hidup sehari-hari terhadap nilai-nilai sekuler bertentangan. Umpunya cintailah tetanggamu sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Kondisi ini biasa dipelajari di sekolah Sabtu dan Minggu.

D. Karakteristik Masyarakat Madani

Secara umum karakteristik masyarakat madani dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa dalam merealisasikan wacana masyarakat madani diperlukan beberapa ciri khas yang harus ada sebagai prasyarat terbentuknya suatu masyarakat, sehingga kekhususannya itu menjadi nilai-nilai universal dan integral dalam menciptakan dan membangun masyarakat yang bernuansa agama. Adapun karakteristik masyarakat madani terdiri dari:

Pertama, *free public sphere* yaitu adanya ruang publik yang bebas sebagai wadah untuk masyarakat mengemukakan pendapatnya. Dimana setiap individu mempunyai posisi yang setara tanpa adanya ketakutan dan kekuatiran dalam menyampaikan pendapatnya. Tim ICCE UIN Jakarta mengemukakan pendapat Arendt dan Habermas bahwa ruang publik secara teoritis, bisa diartikan sebagai wilayah dimana masyarakat sebagai warga negara memiliki akses penuh terhadap kegiatan politik. Warga negara berhak melakukan kegiatan secara merdeka dalam menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul, serta mempublikasikan informasi kepada publik.¹² Ahmad Gaus menekankan bahwa untuk mengatasi tekanan yang dialami masyarakat, dibutuhkan ruang publik yang bebas. Tekanan itu mengisyaratkan pentingnya sebuah ruangan publik yang bebas. (*a free public sphere*). Dan di dalam ruang publik semacam itulah anggota masyarakat sebagai warga negara dapat melakukan

¹²Tim ICCE.UIN Jakarta, *Op.Cit* , h. 248.

tindakan-tindakan politik secara leluasa tanpa mengalami distorsi dan kekhawatiran termasuk menyampaikan pendapat secara tulisan dan lisan¹³ Dengan meniadakan ruangan publik yang bebas dalam tatanan masyarakat madani, dapat dipastikan akan terjadinya pembungkaman kebebasan warga negara dalam menyalurkan inspirasinya terutama yang berkenaan dengan kepentingan umum oleh penguasa yang otoriter dalam pemerintahannya.

Kedua, toleransi merupakan suatu sikap yang hendak dikembangkan dalam masyarakat madani, yaitu suatu sikap yang menunjukkan saling menghargai dan menghormati hak dan aktivitas yang dilakukan oleh orang lain. Dengan sikap toleransi memungkinkan timbulnya kesadaran dari setiap individu untuk menghargai dan menghormati kepercayaan dan pendapat orang lain. Dengan bersikap toleransi memungkinkan timbulnya kesadaran dari setiap individu untuk menghargai dan menghormati pendapat orang lain yang berbeda dengan pendapatnya sendiri. Nurcholish Madjid menekankan bahwa agama mengajarkan faham kemajemukan keagamaan (*religius plurality*). Pemahaman seperti ini menjadikan masyarakat klasik dan inklusivitas sikapnya terhadap masyarakat lain berbeda agama.¹⁴

Sikap toleransi yang dianut itu akan membawa masyarakat kepada sikap keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini Nurcholish mengemukakan pendapat Max I Dimond, seorang Yahudi bahwa ... bagi kaum Yahudi tidak ada lebih terasa asing dari pada peradaban Islam yang fanatis, yang muncul dari debu padang pasir pada abad ke tujuh ini, meskipun Islam mewakili suatu peradaban baru, suatu agama baru, dan suatu lingkungan baru yang dibangun dilandaskan ekonomi baru, namun Islam mempunyai "Prinsip Kebahagiaan Intelektual" yang terwadahi dengan baik yang pernah dihadirkan kepada kaum Yahudi seribu tahun yang lalu. Ketika Iskandar Agung membuka pintu masuk *Hellenistik* kepada mereka.

¹³Nurcholish Madjid, *Civil Society Versi Masyarakat Madani*, *Op.Cit*, h. 317.

¹⁴ Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin Dan Peradaban*, (Jakarta: Paramadina, 1992), h. 191.

Sekarang masyarakat Islam membuka pintu-pintu masjid mereka, sekolah-sekolah mereka dan kamar tidur mereka, pintu agama, pendidikan dan pembaharuan.¹⁵ Peristiwa ini menunjukkan bahwa Islam itu sebagai *rahmatan lil alamin*, Islam itu datang untuk merobah pola pikiran umat manusia dalam kehidupannya dan menyempurnakan budi pekerti manusia.

Ketiga, pluralisme disebut juga dengan kemejemukan, dan hal ini sebagai kehendak Allah dengan sunnatullah menjadikan manusia itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, gunanya adalah untuk saling kenal mengenal diantara individu. Semua yang terdapat dalam masyarakat sengaja diciptakan dengan penuh keragaman sebagai karakteristik suatu masyarakat. Pluralisme atau kemajemukan tidak hanya difahami sebagai sikap yang harus mengakui dan menerima kenyataan sosial masyarakat yang beragam, namun sikap itu harus disertai dengan ketulusan untuk dapat menerima kenyataan bahwa perbedaan itu sebagai sesuatu yang alamiah.

Ubaedillah dan Abdul Rozak mengutip pendapat Nurcholish bahwa; Pluralisme adalah pertalian sejati kebhinnekaan dalam ikatan-ikatan keadaban (*genuine engagement of diversities within the bonds of civility*). Bahkan menurutnya pula, pluralisme merupakan suatu keharusan bagi keselamatan umat manusia, antara lain melalui mekanisme pengawasan dan pengimbangan (*check and balance*).¹⁶

Dengan demikian, pluralisme erat kaitannya dengan sikap toleransi, dan sikap ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat yang majemuk. Dalam perjalanan sejarah umat manusia, seringkali ditemui bahwa konsep pluralisme sulit untuk dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Keempat, demokrasi mengandung arti bahwa masyarakat dapat berlaku santun dalam pola hubungan interaksi dengan masyarakat sekitarnya dengan tidak memandang suku, ras, dan agama, Maka demokrasi merupakan suatu entitas dalam menegakkan dan membangun wacana masyarakat madani, dimana

¹⁵ *Ibid*, h. 192

¹⁶ A.Ubaedillah dan Abdul Rosak (Penyunting), *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah dan The Asis Foundation, 2003), h. 36.

memiliki kebebasan mutlak dalam menjalankan aktivitas kehidupannya sehari-hari, termasuk mengadakan interaksi dengan lingkungannya. Dalam kehidupan masyarakat modern, kehidupan demokrasi merupakan sebagai karakteristik masyarakat yang terbuka, dalam bentuk pluralis, toleran dan keadilan sosial. Sebagaimana kehidupan masyarakat Islam yang dibangun Rasulullah Saw di kota Madinah, sebagai suatu masyarakat yang maju dan modern pada masanya dengan substansi musyawarah dalam mengambil keputusan.

Para pakar ilmu-ilmu sosial mengkaji fenomena-fenomena keagamaan yang terdapat dalam masyarakat madani dan menjadikannya sebagai pola kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Sebagaimana ditegaskan Nurcholish Madjid bahwa demokrasi merupakan salah satu syarat bagi penegakkan masyarakat madani di Indonesia, demokrasi adalah jalan bukan tujuan.¹⁷ Dengan demikian, demokrasi adalah jalan atau sarana yang berada dalam wadah musyawarah, untuk mencapai tujuan Negara, dalam konteks keislaman tujuan negara dirumuskan dalam kalimat “ *baladun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur*”.

Selain itu, demokrasi dapat membantu masyarakat untuk mengawasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi atau pemerintah. Walaupun untuk mengawasi terhadap kegiatan-kegiatan pemerintah bukanlah hanya melalui demokrasi. Tetapi melalui *adigium* yang terdapat dalam politik itu sendiri. Nurcholish menegaskan bahwa salah satunya adalah berangkat dari *adigium* yang terkenal dalam politik. Demokrasi tidak dengan sendirinya menjamin adanya keburukkan tertentu.¹⁸

Kelima, keadilan sosial dalam konteks masyarakat madani dimaksudkan untuk menyebutkan adanya keseimbangan dan pembagian proposional, terhadap hak dan kewajiban setiap warga negara dalam berbagai aspek kehidupan, misalnya; ekonomi, politik, pengetahuan dan lainnya. Atinya dalam konsep keadilan sosial tidak adanya monopoli pada seseorang atau pemusatan

¹⁷ Nurcholish Madjid, *Religiusitas, Membumikan Nilai-Nilai Islam Dalam Kehidupan Madani*, (Jakarta: Pramadina, 2000), h. 10.

¹⁸ Nurcholish Madjid, *Kehampaan Spiritual Masyarakat Modern*, (Jakarta: Penerbit Mediacita, 2000), Cet. I, h. 279.

kekuasaan dan ekonomi bagi kelompok/golongan tertentu. Nanih Machendrawaty menulis pendapat Nurcholish bahwa cita-cita keadilan sosial ialah membangun suatu bentuk tatanan masyarakat bagi setiap warga dijamin haknya untuk hidup menurut pilihannya sendiri atau tetap dalam semangat kebersamaan dan kekeluargaan.¹⁹

Secara esensial setiap individu memiliki hak dalam memperoleh kebijakan-kebijakan atau kesejahteraan hidup oleh pemerintah dimana masyarakat mendapat perlakuan yang sama untuk memperoleh hak dalam melaksanakan kewajibannya. Dewasa ini dalam masyarakat banyak ditemui dinamika orang hanya mementingkan haknya, tetapi mereka mengabaikan kewajibannya yang harus dilaksanakannya sebagai individu.

Dalam konteks sosiologi agama tergambar adanya hubungan antara agama dengan kehidupan masyarakat. Sebagaimana dijelaskan Yusuf al-Qordowi, intelektual muslim kontemporer, mendasarkan masyarakat Islam kepada dua unsur penting, yaitu; *Pertama*, beriman kepada Allah Swt. sebab iman kepada-Nya akan membuat kehalusan dan ketenggian moral serta kesadaran sosial. Selanjutnya akan melahirkan perilaku budaya dan kontrol sosial (moral) yang tinggi. Semua prinsip dan nilai-nilai dari Allah menjadi dasar dari semua aspek kehidupan manusia, baik sosial, ekonomi, politik, hukum, pendidikan, seni, kebudayaan dan sebagainya. Sehingga masyarakat Islam adalah masyarakat yang *Robbany* (berpegang pada nilai-nilai Ilahi), manusiawi dan seimbang (harmonis).²⁰

Dalam konteks sosiologi agama masyarakat madani merealisasikan nilai-nilai Ketuhanan dalam bentuk norma-norma sosial, interaksi sosial, hubungan sosial, bentuk sikap dan pola ingkah laku keagamaan. Masyarakat Islam mendasarkan aktivitasnya pada keimanan kepada Allah Swt. Sebagai acuan dalam kehidupan mereka. Karena kepercayaan kepada Allah akan melahirkan konsep-konsep keimanan lainnya. Islam itu dibina atas tiga pilar yang saling terkait, yaitu; Aqidah, Syari'ah, dan Ishsan

¹⁹ Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad Syafi'i, *Pengembangan Masyarakat Islam dari Ideologi, Strategi sampai Tradisi*, (Bandung: PT.Rosdakarya, 2001), Cet.I, h. 124.

²⁰ Yusuf al-Qordowi, *Kayfa Nata Ma'a al-Qur'an fi al-Addin*, (Kairo: Dar al-Syuruq, 2000), Cet.IV, h. 11.

(Akhlak). Tatkala Aqidah (konsep-konsep kepercayaan) menyentuh kepentingan masyarakat, maka terbentuklah syaria'ah (aturan-aturan) bila seseorang menjalankan syari'ah dengan baik, maka muncul perbuatan (akhlak) yang baik, atau sikap, pola tingkah laku, dan interaksi sosial yang baik dalam masyarakat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Sinergi antara aqidah dan syari'ah akan melahirkan perilaku atau interaksi sosial untuk mengembangkan wacana pluralitas, toleransi, demokrasi dan keadilan sosial.

Kedua, bersifat rasionalitas/ijtihad²¹ terhadap keadaan sosial masyarakat, dan lingkungan tempat tinggalnya, guna untuk dapat memahami kandungan teks al-Qur'an dan as-Sunnah yang berkaitan dengan masalah-masalah kemasyarakatan untuk mewujudkan masyarakat beradab. Intelektual Islam terus mengkaji dan mengembangkan teori-teori ijtihad, dan merombak pola fikir masyarakat dari yang bersifat irrasional menjadi rasional guna menegakkan nilai-nilai dan sikap keagamaan dan pola tingkah laku masyarakat untuk disesuaikan dengan masa kekinian. Dengan berubahnya pola fikir mereka akan berimplikasi ke arah yang lebih baik dalam bidang ekonomi, HAM, penegakkan hukum, demokrasi, toleransi terhadap kemajemukan. Kemudian komponen-komponen masyarakat ini bergerak bersama-sama menuju kepada satu tujuan, yaitu menegakkan *amal ma'ruf* (nilai-nilai baik), dan *nahi mungkar* (mendiadakan nilai-nilai keburukan) akhirnya akan mewujudkan masyarakat utama, yaitu masyarakat yang *tamadhun* atau masyarakat yang memiliki peradaban.

Dengan demikian masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab yang bercirikan berbudi luhur, berakhlak mulia, *egalitarianisme*, menghargai seseorang berdasarkan prestasi kerja yang dilakukannya, dan sifat keterbukaan menunjukkan partisipasi

²¹ Ijtihad diartikan dengan menyerahkan segenap kemampuan dan mengosongkan seluruh wawasan untuk menimpilkan hukum syara' berdasarkan dalil-dalil yang ada dengan cara mengamati, dan memikirkannya. Ijtihad bagi umat adalah *fardhu kifayah*. Kendati demikian, umat akan mendapat dosa jika tidak ada anak-anaknya yang melakukannya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Namun ijtihad ini menjadi *fardhu 'ain* bagi orang yang merasa bahwa dirinya memiliki kemampuan untuk melakukan. Lihat Yusuf al-Qordowi, *Membangun Masyarakat Baru*, (Jakarta: Gema Insan Press, 2000), h. 60.

bagi seluruh anggota masyarakat berdasarkan musyawarah, yang tegak berdiri di atas landasan keadilan yaitu keteguhan berpegang pada hukum, serta tegaknya toleransi dalam masyarakat yang pluralistik

Masyarakat madani dalam konteks keindonesian tidak terlepas dari jiwa/nilai keagamaan yang tercantum dalam butir-butir Pancasila sebagai moralitas masyarakat Indonesia. Secara tidak langsung nilai-nilai agama turut memperkuat kualitas pribadi, sikap dan pola tingkah laku keagamaan masyarakat, yang terlihat dalam bentuk demokrasi, hukum, toleransi, pluralitas, dan keadilan. Thomas F. 'Odea menulis bahwa dalam masyarakat yang sudah mapan agama merupakan salah satu struktur institutional penting yang melengkapi keseluruhan sistem sosial.²² Agama telah menyatu dengan jiwa masyarakat sehingga mereka mengukur segala sesuatu dengan agama. Kartini Kartono mengemukakan pendapat Gordon W. Allport bahwa cara beragama ini disebut dengan intrinsik, artinya cara ini dianggap menunjang kesehatan jiwa, memperkaya kehidupan bathin dan menghidupkan masyarakat yang damai. Sebab agama dipandang sebagai *Comprehensve Commitnet dan Traicing integratigh Motives* yang mengatur seluruh hidup seseorang. Agama diterima sebagai fackor pepadu/pemersatu atau *unifying factor*.²³ Sehingga masyarakat madani mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain dalam berbagai aspek kehidupan manusia secara umum, karena cara bersikap, berfikir, dan pola tingkah laku keagamaan terlihat dalam kehiduapan mereka.

E. Penutup

Agama dicirikan sebagai pemersatu aspirasi manusia yang paling sublim, sebagai sejumlah moralitas, sebagai sumber tatanan masyarakat dan perdamaian batin individu, sebagai sesuatu yang memuliakan dan membuat manusia beradab. Sebaliknya agama dituduh sebagai penghambat kemajuan manusia, dan mempertinggi fanatisme dan tidak toleran, pengacau, dan tahayul.

²² Thomas F. 'Odea, *Sosiologi Agama, Suatu Pengenalan Awal*, Terj.Tim Penerjemah YASOGAMA, (Yogyakarta: Yosagama dan Rajawali, 1984, Cet. I, 1985), h.1.

²³ Kartini Kartono dan Jenny Andari, *Hygiene Mental dan Kesehatan Mental Dalam Islam*, (Bandung: Mandar Maju, Cet. VI, 1989), h. 360.

Kepercayaan merupakan sesuatu yang sentral dalam kehidupan masyarakat, disebabkan mereka selalu menghubungkannya dengan yang bersifat transendental dalam hidup. Agama menawarkan hubungan melalui pemujaan dan upacara ibadah, karena itu memberikan rasa emosional bagi rasa aman baru dan identitas yang lebih kuat ditengah-tengah ketidakpastian dan ketidakmungkinan bagi kehidupan manusia. Namun, setiap tipe masyarakat akan menunjukkan persepsi yang berbeda tentang kedudukan agama dalam kehidupan mereka.

Masyarakat madani dibentuk dengan landasan motivasi, etos keagamaan, akan melahirkan jiwa keagamaan masyarakat. Maka kehidupan masyarakat madani memiliki karakteristik lingkungan masyarakat yang beradab, berbudi luhur, berakhlak mulia, egalitarianisme dan menghargai seseorang berdasarkan pretasi kerjanya. Dan menegakkan hukum, toleransi, pluralistik, berkeadilan sosial dan menghidupkan demokrasi dalam wadah musyawarah.

Daftar Pustaka

- Dadang Kahmat, *Sosiologi Agama, Potret Agama dalam Dinamika Konflik, Pluralisme, dan Modern*, Bandung: CV. Pustaka Setia, Cet. I, 2010.
- Elizabeth K,Nottingham, *Religion And Society*, terj, Abdul Muis Naharong, Jakarta : CV. Rajawali, Cet. I, 1985.
- Kartini Kartono dan Jenny Andari, *Hygiene Mental dan Kesehatan Mental Dalam Islam*, Bandung: Mandar Maju, Cet. VI, 1989.
- M. Dawam Raharjo, *Masyarakat Madani: Agama Kelas Menengah dan Perubahan Sosial*, Jakarta: LP3ES, 2009.
- Nurcholish Madjid, *Civil Society Versi Masyarakat Madani*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1990.
-, *Kehampaan Spiritual Masyarakat Modern*, Jakarta: Penerbit Mediacita, 2000.
-, *Islam Doktrin Dan Peradaban* , Jakarta : Paramadina, 1992.
-, *Kehampaan Spiritual Masyarakat Modern*, Penerbit Mediacita, 2000.
-, *Religiusitas, Membumikan Nilai-Nilai Islam Dalam Kehidupan Madani*, Jakarta: Paramadina, 2000.

- Nani Machendrawaty dan Agus Ahmad Syafi'i, *Pengembangan Masyarakat Islam dari Ideologi, Strategi sampai Tradisi*, Bandung : PT.Rosdakarya, Cet.I, 2001.
- Robert H. Tahouless, *Pengantar Psikologi Agama*, Jakarta : Rajawali Press, Cet. I, 1992.
- Tim ICCE UIN Jakarta, *Pendidikan Kewargaan (civic Education) Demokrasi, Hak Asasi manusia & Masyarakat Madani*, Jakarta : Pustaka Media, Edisi Revisi, 2003.
- Thomas F. 'Odeh, *Sosiologi Agama, Suatu Pengenalan Awal*, Terj.Tim Penerjemah YASOGAMA, Yogyakarta : Yosagama dan Rajawali, 1984, Cet. I, 1985.
- Ubaedillah dan Abdul Rosak (Penyunting), *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Tim ICCE UIN Syarif Hidayatullah dan The Asis Foundation, 2003.
- Yusuf al-Qordowi, *Kayfa Nata Ma'a al-Qur'an fi al-Addin*, Kairo: Dar al-Syuruq, Cet.IV, 2000.

*Drs. Syaiful Hamali, M.Kom.I adalah dosen tetap Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung. Alumni Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, saat ini sedang melanjutkan ke pendidikan Doktor (S3) pada Perguruan Tinggi yang sama.